

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Venezuela pasca pemerintahan Hugo Chavez kerap diragukan kekuatannya sebagai negara yang anti terhadap Amerika Serikat. Kehilangan sosok seorang pemimpin yang tegas dan berani menentang hegemoni Amerika Serikat, menimbulkan persepsi bahwa Venezuela tidak akan lagi menjadi oposisi yang menakutkan bagi Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan anti-liberalisme dan anti-kapitalisme pada masa pemerintahan Chavez, menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Salah satu keberhasilan pemerintahannya ialah menasionalisasi ladang-ladang minyak yang dikelola Exxon Mobil, sehingga perusahaan minyak negara Venezuela-PDVSA menghentikan penjualan minyak mentah kepada perusahaan minyak Amerika Serikat tersebut.¹

Kontrol terhadap PDVSA mengantarkan Venezuela ke arah yang lebih maju, sebelum Chavez memimpin (1986-1996) pertumbuhan GDP hanya 1,4%. Namun ketika Chavez berhasil mengontrol PDVSA, pertumbuhan GDP meningkat menjadi 3,2% per tahunnya.² Pertumbuhan ini juga mengantarkan Venezuela sebagai importir minyak mentah terbesar ke empat bagi Amerika Serikat di bawah Canada, Arab Saudi, dan Mexico. Menurut

¹*Venezuela hentikan Penjualan kepada Exxon*, <http://www.dw.com/id/venezuela-hentikan-penjualan-minyak-kepada-exxon/a3125200>, diakses pada 15 oktober 2015

²Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas, *Profil Venezuela*, <http://www.kemlu.go.id/caracas/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=4&l=id>, diakses pada 15 Oktober 2015

data yang di dikeluarkan *Independent Statistics and Analysis U.S Energy Information Administration* pada bulan Januari 2015, Venezuela mengimpor minyak mentah sebanyak 615.000 barrel per hari ke Amerika Serikat.³

Kebijakan nasionalisasi perusahaan asing di Venezuela oleh Hugo Chavez dan persepsi anti Amerika Serikat, meletakkan kedua negara pada posisi yang konfrontatif. Hubungan ini semakin memuncak ketika Hugo Chavez mengusir dubes AS pada September 2008 terkait dengan polemik kegiatan AS di Bolivia, tetangga dekat Venezuela. Saat itu AS yang masih diperintah George W. Bush, Washington pun tak mau kalah dengan mengusir dubes Venezuela.⁴ Keberanian pemerintah Venezuela masa Hugo Chavez memang layak menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Namun setelah ia meninggal, citra Venezuela yang demikian diragukan untuk dapat dipertahankan.

Menindaklanjuti kebutuhan akan pemimpin, Venezuela menggelar pemilihan umum pada 14 April 2013. Pada pemilihan tersebut, nama Nicolas Maduro akhirnya terpilih sebagai pengganti Hugo Chavez, yang dilantik secara resmi pada 19 April 2013. Nicolas Maduro merupakan tangan kanan Hugo Chavez, maka tidak heran bahwa akan didapati pemikirannya mengenai pemerintahan tidak berbeda dari Hugo Chavez. Hal ini dapat dilihat melalui potongan sumpahnya pada saat pelantikan presiden Venezuela,

³Independent Statistics & Analysis U.S. Energy Information Administration, *Company Level Import*, <http://www.eia.gov/petroleum/imports/companylevel/>, diakses pada 16 oktober 2015

⁴Razali, Rino, *Analisis Penerapan Kebijakan Ekonomi Sosialis Venezuela pada Masa Pemerintahan Hugo Chavez menghadapi Imperialisme Ekonomi Amerika Serikat tahun 1998-2013*, hal. 7-8.

yaitu “Saya bersumpah kepada seluruh Rakyat Venezuela, kepada Comandante Tertinggi (Hugo Chavez), bahwa saya akan patuh dan menghormati konstitusi Republik...untuk membangun bangsa sosialis, merdeka, dan independen untuk semua”.⁵

Walaupun demikian, kepemimpinan Nicolas Maduro belum mampu mengangkat keamanan Venezuela. Nicholas Maduro mendapatkan tantangan besar dalam aspek ekonomi, politik dan sosial. Di akhir masa pemerintahan Chavez pada 2012, pertumbuhan GDP Venezuela mencapai 5,6%. Namun turun drastis menjadi 1,3% di masa awal pemerintahan Nicolas Maduro tahun 2013. Selain itu tingkat inflasi pun terus meningkat, pada 2012 hanya sebesar 21,1%, tahun 2013 meningkat menjadi 40,6%, sedangkan pada 2014 mencapai 62,2%.⁶

Selain itu, kondisi politik yang tidak stabil ditandai dengan gelombang protes besar-besaran. Pada 2 Februari 2014 mahasiswa merencanakan unjuk rasa besar di Caracas menuntut Presiden Maduro mundur karena tingginya angka kejahatan, tingginya tingkat inflasi dan kurangnya suplai pangan ke masyarakat. Namun demonstrasi tersebut berujung pada bentrok yang mengakibatkan korban jiwa hingga 40 orang.⁷ Protes tersebut masih bertahan sampai tahun 2015, hal serupa masih disuarakan pada peringatan satu tahun gerakan protes tersebut pada 12 Februari 2015.

⁵*Nicolas Maduro Dilantik sebagai Presiden Venezuela*, <http://www.berdikarionline.com/nicolas-maduro-dilantik-sebagai-presiden-venezela/>, diakses pada 9 Oktober 2015

⁶ World Bank

⁷*Violent clashes in Venezuela on Protest Movement Anniversary*, <http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2951454/Violent-clashes-Venezuela-protest-movement-anniversary.html>, diakses pada 12 oktober 2015

Kemudian dalam aspek sosial, pemerintah Nicolas Maduro dihadapkan dengan tingginya tingkat kejahatan dan kekerasan. *The Venezuelan Violence Observatory*, salah satu organisasi non-pemerintahan, memaparkan bahwa terjadi 24.763 kasus pembunuhan pada 2013, dengan rasio 79 kasus per 100.000 orang penduduk. Hal ini meningkat dari jumlah kasus pembunuhan tahun 2012 sebanyak 21.692 kasus, dengan rasio 73 kasus per 100.000 orang penduduk.⁸ Berdasarkan pemaparan mengenai kondisi Venezuela diatas, tidaklah berlebihan jika banyak pengamat menyatakan Venezuela tengah berada pada situasi krisis selama pemerintahan Nicolas Maduro.

Di tengah kondisi krisis tersebut, sangat mengejutkan bahwa Amerika Serikat menetapkan Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional AS. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menandatangani *executive order* 13692 pada 8 Maret 2015 yang mendeklarasikan Venezuela sebagai ancaman keamanan AS. Di bawah ini merupakan kutipan dari *executive order* 13692:

"BARACK OBAMA, President of the United States of America, find that the situation in Venezuela, including the Government of Venezuela's erosion of human rights guarantees, persecution of political opponents, curtailment of press freedoms, use of violence and human rights violations and abuses in response to antigovernment protests, and arbitrary arrest and detention of antigovernment protestors, as well as the exacerbating presence of significant public corruption, constitutes an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States, and I hereby declare a national emergency to deal with that threat".⁹

Seiring dengan hal tersebut, AS juga menetapkan sanksi kepada tujuh pejabat Venezuela. Sanksi berupa pembekuan aset milik ketujuh pejabat itu

⁸ Sullivan, M. P. 2014. *Venezuela: Background and U.S. Relations*, Congressional Research Service, hal. 11-12.

⁹ The White House, *Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing The situation in Venezuela*, 8 Maret 2015

dan melarang warga Amerika Serikat berbisnis dengan mereka. Ketujuh pejabat tersebut ialah Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padron, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez, dan Miguel Alcides Vivas Landino. Ketujuh pejabat negara Venezuela tersebut disangsi oleh AS diakarenakan keterlibatan mereka dalam penanganan demonstrasi yang memakan korban jiwa pada Februari 2015.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini menimbulkan protes dari Pemerintah Venezuela. Protes tersebut disampaikan melalui iklan satu halaman penuh yang diterbitkan di *New York Times* dengan judul "*Letter to The People of United States: Venezuela is not a Threat*".¹⁰ Iklan ini berisikan permintaan agar pemerintah AS membatalkan *executive order* dan sanksi terhadap pejabat Venezuela. Penetapan Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional AS sebenarnya cukup mencengangkan. Di tengah kondisi dalam negeri Venezuela pasca Chavez yang sedang krisis, AS malah menganggap Venezuela sebagai ancaman.

B. Rumusan Masalah

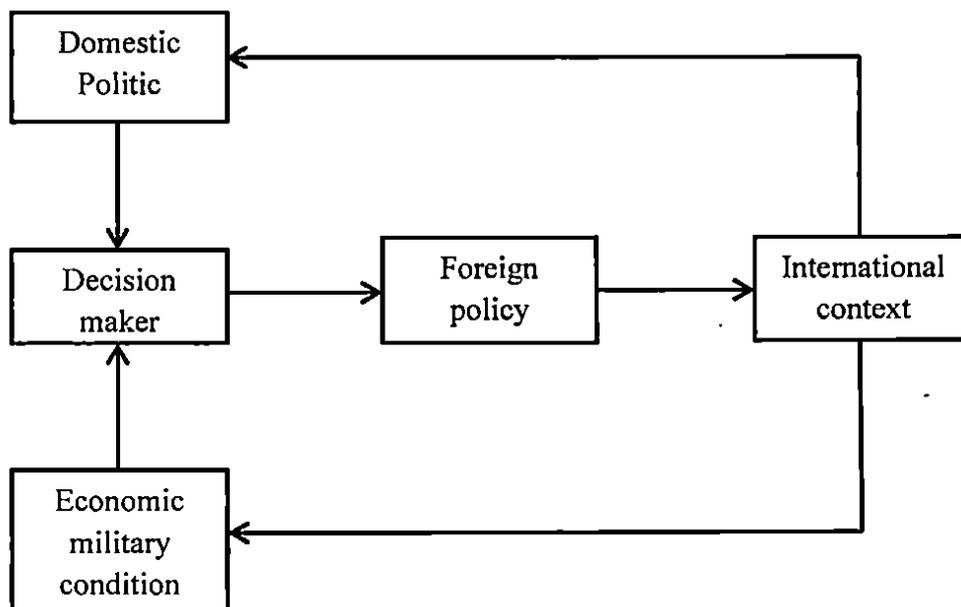
Mengapa AS masih menganggap Venezuela pasca Chavez sebagai ancaman terhadap keamanan Nasional AS?

¹⁰*Venezuela Advert in US press demands Obama Rescind 'national Security Threats'*, <http://www.theguardian.com/world/2015/mar/17/venezuela-advert-new-york-times-obama-national-security-threat>, diakses pada 17 Oktober 2015

Untuk mempermudah pemahaman mengenai teori ini, William D. Coplin menjelaskan melalui gambar berikut ini:¹²

Gambar. 1.1

Proses pengambilan Keputusan William D. Coplin



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa *domestic politic*, *economic and military condition*, serta *international context* menekan pengambil keputusan (*Decision Maker*) yaitu pemerintah untuk menetapkan kebijakan luar negerinya. Sehingga, kebijakan yang diambil pemerintah bukan semata-mata merupakan kemauan dari pengambil keputusan, namun merupakan hasil dari pertimbangan terhadap tiga deteminan tersebut. Namun, pengambil keputusan memegang peran paling penting dalam karena memiliki kewenangan dalam menyetujui kebijakan luar negeri. Determinan politik domestik, ekonomi, militer, dan internasional konteks memiliki kemampuan untuk mempengaruhi.

¹² Ibid.

Politik Domestik

Politik Domestik merupakan salah satu determinan terhadap terbentuknya kebijakan luar negeri sebuah negara. Kondisi politik dalam negeri tersebut dapat dilihat melalui stabilitas situasi politik dalam negeri serta jenis sistem politik yang dianut pemerintahannya.

Kondisi ekonomi dan militer

Pertimbangan terhadap kedua aspek berikut ini merupakan salah satu pertimbangan yang berpengaruh cukup signifikan terhadap terciptanya kebijakan luar negeri sebuah negara. Upaya untuk memperbaiki, meningkatkan ataupun melindungi stabilitas kondisi ekonomi dan militer membuat pengambil keputusan perlu mempertimbangkan aspek ini untuk membentuk kebijakan luar negeri.

Konteks Internasional

Konteks internasional mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri disebabkan oleh lokasi yang didudukinya dalam kaitannya dengan negara lain dalam sistem tersebut. Serta hubungan politik, militer dan ekonomi sebuah negara yang akan memberlakukan ataupun dikenakan kebijakan luar negeri terhadap negara-negara lain. Konteks internasional merupakan pertimbangan dari luar negeri negara yang akan menetapkan sebuah kebijakan internasional.

Pengambil Keputusan

Determinan ini merupakan faktor yang muncul dari aspek pemerintahan sebuah negara. Sebuah kebijakan luar negeri dapat berlaku apabila

pengambil keputusan menyetujui pertimbangan yang muncul terhadap terbentuknya kebijakan luar negeri. Determinan lain seperti politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional merupakan pertimbangan yang muncul bagi pengambil keputusan untuk menetapkan sebuah kebijakan luar negeri.

2. Konstruktivisme

Pandangan utama dari konstruktivisme dalam hubungan internasional ialah bahwa hubungan internasional merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial. Sehingga, perilaku negara dalam hubungan internasional tidak semata merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia seperti yang dikemukakan kaum realis, melainkan merupakan perwujudan dari identitas sebuah negara yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia yang membuatnya, serta hidup di dalamnya. Karena menurut Alexander Wendt, prinsip fundamental dari konstruktivisme yaitu: "1) *people's actions are based on meanings* ;2) *meanings arises out of interaction*."¹³ Melalui dua prinsip tersebut Wendt sangat tegas mengatakan bahwa interaksi antar manusia nantinya akan menentukan tujuan mereka, yang kemudian menjadikan tujuan tersebut sebagai landasan dari aksi yang akan dilakukan. Interaksi antar manusia tersebut, kemudian menciptakan identitas sebuah negara. Sehingga, jika diterapkan kedalam hubungan internasional, Alexander Wendt

¹³Zehfuss, M. 2002. *Constructivism in International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge, hal.39

menyampaikan bahwa “*the way the international politics is conducted is made, not given, because identities and are constructed and supported by intersubjective practice*”.¹⁴

Dalam pandangan konstruktivisme, identitas sebuah negara memegang peran penting dalam terbentuknya kebijakan sebuah negara. Seperti yang disampaikan Wendt bahwa “*Without interests identities have no motivational force, without identities interests have no direction*”.¹⁵ Maka dari itu, penting diketahui pengertian dari identitas. Identitas dalam Oxford dictionaries berarti “*The characteristics determining who or what a person or thing is*”. Sedangkan secara singkat, Maxym Alexandrov mencoba menyimpulkan dari argumen-argumen Alexander Wendt bahwa “*identity as state's self understanding*”.¹⁶ Dari pengertian di atas kita ketahui bahwa identitas merupakan pemahaman negara terhadap dirinya sendiri yang menentukan bagaimana tindakannya terhadap negara lain. Tindakan tersebut menentukan pandangan negara lain terhadap dirinya.

Karena identitas negara bukanlah hal yang *given* serta terbentuk melalui proses interaksi dan *shared ideas* antara masyarakat di dalamnya serta interaksi negara dengan negara yang lain, kaum konstruktivis memaparkan bahwa budaya dan norma berpengaruh pada identitas

¹⁴Ibid, hal.

¹⁵Wendt, A. 1999. *Social Theory in International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge

¹⁶Alexandrov, M.2003. *The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical analysis*, Jurnal of International Developmentand Cooperation, Hiroshima, hal. 38

sebuah negara. Menurut Oxford Dictionaries, budaya adalah “ *The ideas, customs, and social behaviour of a particular people or society*”.¹⁷ Dalam tulisannya *Social Theory of International Relations*, Alexander Wendt menyebutkan Hobesian, Lockean, dan Kantian sebagai “*culture of anarchy*”. Kata “*culture*” mengacu pada “pengetahuan bersama secara sosial”, “pengetahuan” pada gilirannya didefinisikan sebagai “ setiap keyakinan seorang aktor yang diperlukan untuk menjadi kenyataan ”.¹⁸ Dari bermacam pengertian tersebut, budaya merupakan keyakinan sebuah negara yang terbentuk dari pengetahuan bersama yang kemudian menjadi kebiasaan negara dalam bertindak.

Sedangkan norma dalam Oxford Dictionaries adalah “*A standard or pattern, especially of social behaviour, that is typical or expected*”.¹⁹ Dalam kaitannya dengan konstruktivisme, pengertian norma menurut Katzenstein dalam tulisan Maxym Alexandrov ialah “*collective expectations for the proper behavior of actors within a given identity*,”.²⁰ Jadi dalam pandangan konstruktivis, norma merupakan harapan yang muncul ketika negara menerima identitas terhadap dirinya. Sehingga, beberapa aksi nantinya diperbolehkan atau pun dilarang oleh norma ketika aksi tersebut sesuai atau pun tidak sesuai dengan identitas negara.

¹⁷Oxford Dictionaries, <http://www.oxforddictionaries.com/>, diakses pada 19 Oktober 2015

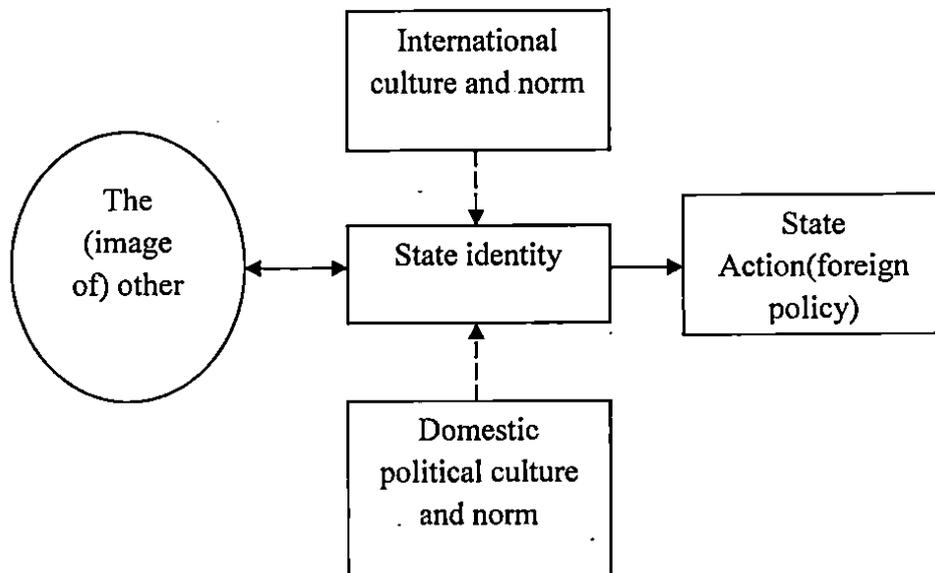
¹⁸Alexandrov, M, op. cit., hal.35

¹⁹Oxford Dictionaries, <http://www.oxforddictionaries.com/>, diakses pada 19 Oktober 2015

²⁰Alexandrov, M, op. cit.,hal.36

Untuk mempermudah, Maxym Alexandrov menggambarkan bagaimana pengaruh budaya dan norma terhadap identitas dalam mempengaruhi aksi dari sebuah negara dalam pandangan Alexander Wendt:²¹

Gambar 1.2
Identitas Mempengaruhi Aksi Sebuah Negara



Berdasarkan pola diatas, budaya dan norma baik dari domestik ataupun internasional akan mempengaruhi identitas sebuah negara. Sedangkan *image* terhadap negara lain, menentukan anggapan negara terhadap negara lain ataupun anggapan negara lain terhadap sebuah negara. Anggapan-anggapan ini mempengaruhi aksi dari sebuah negara.

Dalam kaitannya dengan Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional Amerika Serikat, konstruktivisme digunakan sebagai kaca mata

²¹ibid

untuk menjelaskan bahwasanya perspektif AS terhadap Venezuela serta identitasnya mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Venezuela.

D. Hipotesa

Amerika Serikat masih menganggap Venezuela pasca Chavez sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya dikarenakan:

1. Venezuela tidak sejalan dalam upaya AS memerangi narkoba
2. Venezuela tidak memerangi terorisme dan perlombaan senjata
3. Venezuela tidak menjamin HAM di masyarakatnya
4. Identitas Amerika Serikat dalam politik domestiknya menyebabkannya selalu menganggap Venezuela sebagai ancaman

E. Lingkup penelitian

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul “Venezuela Pasca Chavez sebagai Ancaman terhadap Keamanan Nasional Amerika Serikat” dan ditetapkannya masalah ini sebagai objek penelitian, maka penulis membatasi pembatasan pada hubungan Amerika Serikat dan Venezuela pasca Chavez (2013-2015).

F. Metodologi

1. Metodologi Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan alasan Penetapan Venezuela sebagai ancaman keamanan Amerika Serikat

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dokumen, dan bahan dari internet. Data tentang Amerika Serikat, Venezuela, pengambilan kebijakan luar negeri, ataupun konstruktivisme pada penelitian ini didapatkan dari beberapa buku, jurnal, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Selain itu, juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan disajikan dalam pembahasan menurut pembagian bab-bab sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, dan, sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab yang akan berupaya menjelaskan kondisi Venezuela pada masa transisi dari Pemerintahan Hugo Chavez ke Nicholas Maduro.

BAB III, merupakan bab yang menjelaskan perspektif Amerika Serikat terhadap Venezuela sehingga masih menganggap Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional.

BAB IV, merupakan bab yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat menetapkan Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional.

BAB V, merupakan bab penutup dan berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan paparan atau dekripsi fakta-fakta dan sepetah saran atau preskripsi yang konstruktif.